



**DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN JOMBANG**

**LAPORAN CAPAIAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAN
(LKJIP)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PETERNAKAN
JL. Soekarno Hatta No. 168 Telp.(0321) 861784, Fax.(0321)
867163
JOMBANG 61413**

**KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan sasaran yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pertendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2019-2024. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada tahun 2023. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 ini berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Capaian kinerja pada tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang di tahun-tahun mendatang.

Jombang, Februari 2024

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN JOMBANG**



Dr. PUJI SUSILO SUGIOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196412251990031004



Pembina Utama Muda
NIP. 196412251990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis.....	7
1.4 Cascading Kinerja	8
1.5 Proses Bisnis.....	9
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	10
1.7 Keuangan.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja	15
2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	18
2.2 Perjanjian Kinerja	19
2.3 Rencana Anggaran.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	23
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua tahun terakhir).....	33
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.....	34
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/internasional.....	42
3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja.....	44
3.2. Ralisasi Anggaran.....	46
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....	46
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	47
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja.....	51



BAB IV. PENUTUP 53



DAFTAR TABEL

1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Tahun 2023	11
2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
2.3 Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran	21
3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	23
3.2 Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2023	25
3.3 Capaian Sasaran Program Dinas Peternakan Tahun 2023.....	26
3.4 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2021- 2023.....	33
3.5 Perbandingan Kinerja Program Tahun 2021 – 2023	33
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA.....	35
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Program s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA.	36
3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional	42
3.9 Capaian Kinerja Pertumbuhan Produksi Daging Dirjen PKH Tahun 2022-2023....	43
3.10 Capaian Kinerja Pertumbuhan Produksi Telur Dirjen PKH Tahun 2022-2023....	43
3.11 Capaian Kinerja Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu Dirjen PKH Tahun 2023.....	44
3.12 Rincian belanja per program Tahun 2023	46
3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran.....	47
3.14 Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	48
3.15 Gambaran Umum Pegawai di Lingkup Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023.....	49
3.16 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Manusia.....	49
3.17 Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Tahun 2023.....	50
3.18 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.....	51



DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kab. Jombang Tahun 2021	2
1.2 Cascading Dinas Peternakan Tahun 2023.....	14
1.3 Probis Dinas Peternakan Tahun 2023.....	15



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.....	52
2. Sasaram Kinerja Pegawai.....	53
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja.....	55
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	56
5. Pengukuran Kinerja.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan akuntabel dan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/ manfaat kepada masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna. Selanjutnya salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi, agar instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran.

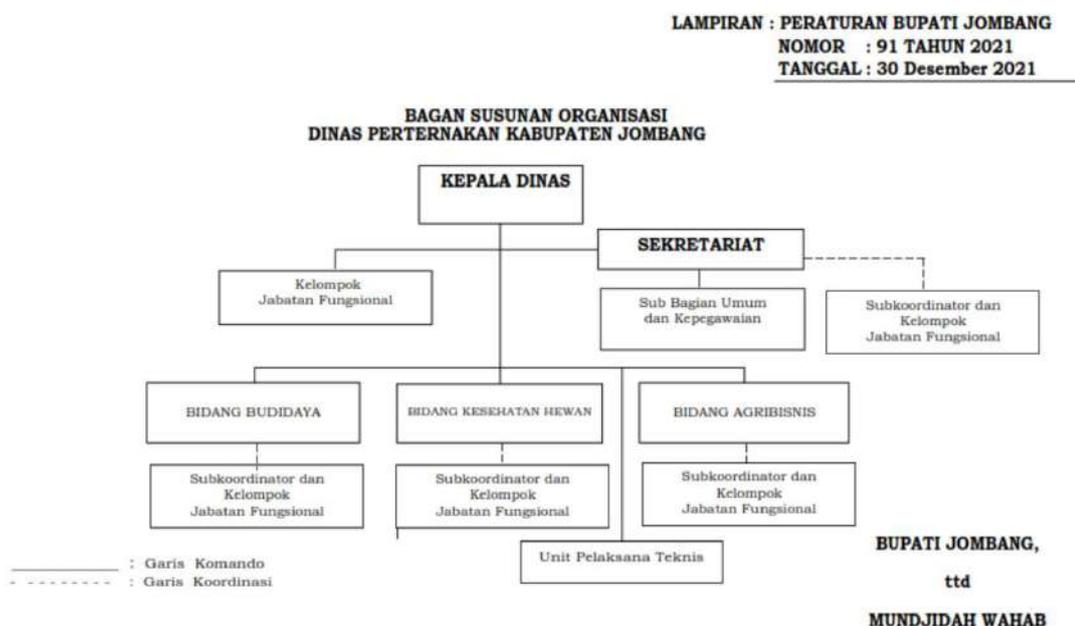
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, **Struktur Organisasi** Dinas Peternakan dengan mendasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, berkoordinasi dengan:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Kelompok jabatan Fungsional.
- c. Bidang Budidaya, berkoordinasi dengan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, berkoordinasi dengan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Agribisnis, berkoordinasi dengan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2 Cascading Dinas Peternakan Tahun 2023



1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut:



(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

- Fungsi Sekretariat:
 - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
 - h. Pengelolaan aset;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkup Dinas;
 - m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar



Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);

- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Sub Bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Peternakan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Peternakan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;



- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

(2) Bidang Budidaya

Bidang Budidaya mempunyai **tugas** pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan.;

- **Fungsi** Bidang Budidaya:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas budidaya dan pengembangan ternak;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak terutama dalam peningkatan mutu bibit;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu makanan ternak;
- d. Pelaksanaan pembiakan dalam rangka peningkatan pengelolaan budidaya ternak;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

(3) Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

- **Fungsi** Bidang Kesehatan Hewan :

- a. Penyusunan dan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



- b. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan dan standart Pelayanan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan hegien, sanitasi usaha peternakan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- h. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan, vaksin dan sera;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan.

(4) Bidang Agribisnis

Bidang Agribisnis mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan kelembagaan, SDM dan penyuluhan, urusan bina usaha dan rekomendasi perizinan peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

- **Fungsi** Bidang Agribisnis:

- a. Penyusunan program kerja pelaksanaan tugas agribisnis;
- b. Pelaksanaan identifikasi dan potensi serta perencanaan pengembangan permodalan, kelembagaan usaha dan jasa serta sistem agribisnis;
- c. Pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengolahan data usaha peternakan, promosi pengolahan dan pemasaran hasil usaha peternakan dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis dan untuk statistik usaha peternakan;



- f. Pelaksanaan koordinasi, analisa penyajian data statistik usaha peternakan serta rekomendasi perizinan bidang usaha dan jasa peternakan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan

(5) UPTD Rumah potong Hewan (RPH)

- Mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Jombang maka Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mempunyai **UPTD Rumah Potong Hewan, kelas B**. UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pemotongan hewan.
- **Fungsi** UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan jagal hewan;
 - c. Pelayanan penyuluhan pemotongan hewan kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - e. Pelaksanaan informasi teknis baku pemotongan hewan yang sehat;
 - f. Pemberian pelayanan jasa pemotongan hewan; dan
 - g. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan

1.3 ISU STRATEGIS

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat



beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang.

Isu Strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan peternakan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pentingnya keamanan pangan;
2. Pentingnya peningkatan status kesehatan hewan milik masyarakat;
3. Kurangnya keamanan produk olahan hasil peternakan;
4. Dinamika kelompok kurang maksimal;
5. Swasembada hasil ternak tidak terwujud;
6. Populasi dan Produksi ternak makin menurun;

1.4 CASCADING KINERJA

Berdasarkan perkembangannya, Jombang mengalami dinamika yang diantaranya terdapat berbagai masalah pokok yang menjadi tantangan pembangunan untuk diemban Bupati dan Wakil Bupati Jombang selama masa jabatannya, antara lain :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
6. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis Kabupaten Jombang tersebut, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai berikut : **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) **Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023** sebagai berikut :

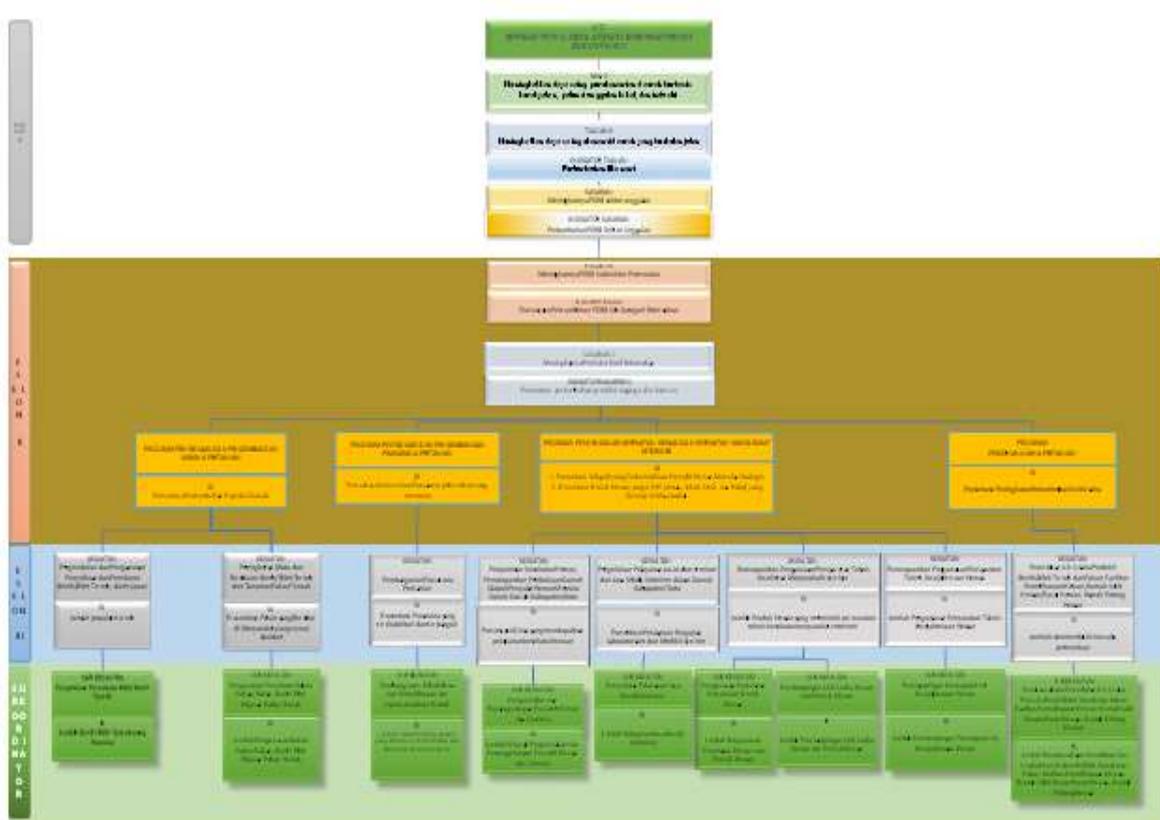
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya;

3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan Potensi Unggulan Lokal dan Industri;

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan Potensi Unggulan Lokal dan Industri.**

Peranan Dinas Peternakan dalam mendukung Visi dan Misi dengan tujuan Meningkatnya PDRB Sub Sektor Peternakan dengan indikator Pertumbuhan PDBR sektor Peternakan dan Sasaran meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan dengan indicator Persentase pertumbuhan populasi Peternakan dan Persentase Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan.

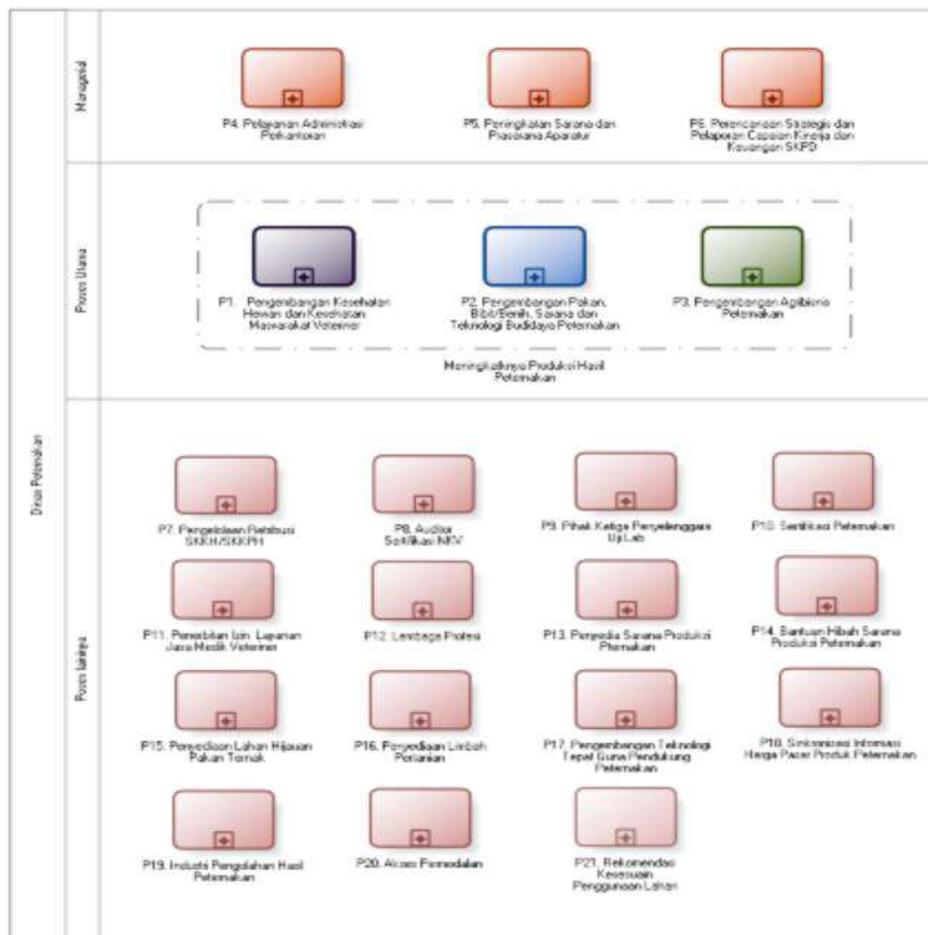
Gambar 1.2 Cascading Dinas Peternakan Tahun 2023



1.5. PETA PROSES BISNIS

Dinas Peternakan telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar Bidang guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Peternakan dapat digambarkan sebagaimana berikut.

Gambar 1.3 Probis Dinas Peternakan Tahun 2023



1.6. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Inspektur Nomor X.700/566/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah 80,14% dengan kategori **(A) Memuaskan** dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Melengkapi penetapan target indikator sasaran strategis Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 80,2 dengan analisa/penjelasan dan perhitungan yang jelas.
2. Melakukan evaluasi atas Rencana Aksi yang belum mendukung kinerja pada sub kegiatan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan atas rencana hasil kerja “terlaksananya pendataan peserta AUTS/K” sehingga dapat mendukung kinerja di atasnya.
3. Melakukan koreksi atas perhitungan capaian kinerja yang kurang tepat serta melengkapi pengukuran capaian kinerja dengan dokumentasi yang



jelas dan lengkap serta catatan monitoring evaluasi dan alternatif tindak lanjut atas capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

4. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas ketidaksesuaian penyajian data sasaran kinerja, target, realisasi dan capaian mulai dari staf, managerial sampai kepada pimpinan tertinggi pada dokumen pengukuran kinerja sehingga hasil dari pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan, penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
5. Menyajikan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian pada Laporan Kinerja.
6. Melakukan perbaikan atas penyajian uraian Bab IV Penutup poin Saran dan Tindak Lanjut yakni dengan menyajikan saran dan tindak lanjut yang selaras dengan uraian permasalahan dan kendala pada Sub bab 3.1.3 Realisasi Kinerja dan Target Renstra Jangka Menengah.

1.7 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
I	PENDAPATAN DAERAH	570.000.000	374.013.800
	Hasil Retribusi Daerah	570.000.000	374.013.800
	Retribusi Jasa Usaha	510.000.000	314.000.000
	Retribusi Rumah Potong Hewan	465.000.000	269.000.000
	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	45.000.000	45.000.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.000.000	60.013.800
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	60.000.000	60.013.800
	Penjualan Hasil Peternakan	60.000.000	60.013.800
II	BELANJA LANGSUNG	8.755.383.024	10.491.720.224
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,679,411,462	7.054.366.282
	I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.073.700	19.723.700
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.694.050	9.344.050
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.379.650	10.379.650



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
	II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.669.489.453	5.674.455.953
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.547.542.603	5.547.542.603
	4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.230.000	120.196.500
	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.821.700	2.821.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.895.150	3.895.150
	III Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000
	6 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	1.000.000
	V Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.639.309	491.453.909
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.497.620	15.497.620
	8 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.102.889	84.987.889
	9 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.998.800	261.140.400
	10 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.342.000	26.342.000
	11 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.056.000	38.056.000
	12 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.642.000	65.430.000
	VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	243.859.788
	13 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	23.589.498
	14 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	75.220.374
	15 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	145.049.916
	VII Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.400.000	340.440.000
	16 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000,000	120.180.000
	17 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.400,000	220.260.000
	VIII Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.809.000	283.432.932
	18 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,010,000	40.010.000



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
	19 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.369.000	169.889.000
	20 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	35.448.780
	21 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.430,000	38.085.152
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	454.004.776	1.930.429.993
	IX Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	34.435.500	34.435.500
	22 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak	34.435.500	34.435.500
	X Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	419.569.276	1.805.773.276
	23 Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	419.569.276	1.805.773.276
	XI Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0	90.221.217
	24 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	0	90.221.217
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.631.121.336	1.465.750.499
	XII Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	289.970.292	227.179.055
	25 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	289.970.292	227.179.055
	XIII Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.	785.875.000	752.875.000
	26 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	785.875.000	752.875.000
	XIV Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	375.944.081	279.164.481
	27 Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	335.239.631	222.386.031
	28 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	40.704.450	56.778.450
	XV Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	179.331.963	206.531.963
	29 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	179.331.963	206.531.963
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	23.845.450	41.173.450



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
	XV Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	23.845.450	41.173.450
	30 Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	23.845.450	41.173.450

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang merupakan manifestasi komitmen Dinas Peternakan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Sebagai langkah perencanaan taktis strategis yang merupakan proses orientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian **Visi** Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 : **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 3 (tiga) misi yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang, maka Dinas Peternakan ikut dalam mewujudkan **Misi Ketiga** yaitu : **“Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri”**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun rumusan **Tujuan** di dalam Perencanaan Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah:

“Meningkatnya PDRB Sub Sektor Peternakan”

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah: ***“Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”***. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu*
2. *Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah*

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis



2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.

2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Program & Kegiatan yang terkait:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2018–2023 kedepan akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja



Perangkat Daerah. Penetapan Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu	%	3,29
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		80,2

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2023 mengacu pada RKT Tahun 2022. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan sub kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 target indikator sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan yaitu :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu	3.29 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,2



	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase rata-capaian kinerja aparatur	100 %	7.054.366.282
2.	Terlaksananya Peningkatan Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Pertumbuhan Populasi Ternak	5,6 %	1.840.208.776
3.	Terlaksananya ketersediaan prasarana yang memadai	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase ketersediaan prasarana peternakan yang memadai	10 %	90.221.217
4.	Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis	81 %	1.465.750.499
			Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	87.5 %	
5.	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	80 %	41.173.450

Dari sasaran tersebut terdapat 5 (Lima) program yang mendukung keberhasilan capaian target indikator sasaran tersebut. Masing-masing sasaran memiliki indikator sasaran yang didukung oleh beberapa program. Sasaran dan program yang ditetapkan tersebut menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 antara Kepala Dinas Peternakan dengan Bupati Kabupaten Jombang.

2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Peternakan Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 8.755.383.024,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 10.491.720.224,-.



Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 memiliki dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui dana APBD Perubahan Tahun 2023 dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.

Tabel . 2.3

Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	%
1.	Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan	3.417.254.395	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	6.679.411.462	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola urusan bidang Peternakan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Peternakan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran atau juga dengan membandingkan antara realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Presentase pertumbuhan produksi daging susu dan telur	3,29%	3,30%	100,3
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,20%	80,14%	99,93

Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa presentase pertumbuhan, yaitu:

1. Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu

Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu di Kabupaten Jombang terealisasi sebesar 3,30 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,29 % dengan nilai capaian sebesar 100,3 % sehingga target dapat dicapai. Secara umum produksi ternak mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan karena populasi peternakan di Kabupaten Jombang secara umum mengalami peningkatan kecuali pada unggas petelur, buras, itik dan entok karena banyak peternak yang sudah beralih berusaha di bidang peternakan tetapi ke industri sebagai pekerja. Pada ternak unggas populasi berbanding lurus dengan produksi baik daging maupun telur sehingga produksi telur mengalami penurunan sedangkan



untuk produksi daging ternak ruminansia mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan sedangkan produksi susu juga mengalami peningkatan meskipun tidak significant karena untuk produksi susu pemasaran hasil dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (netsle dan indolakto). Meskipun terjadi wabah minat masyarakat untuk berternak masih tinggi karena ada jaminan ganti rugi dari pemerintah dan adanya pelayanan inseminasi buatan, PKB, Pelayanan kesehatan ternak terpadu serta asuransi ternak AUTS kepada masyarakat

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan sebesar 80,14 dari target yang ditetapkan sebesar 80,2 dengan nilai capaian sebesar 99,93% hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan manajemen kinerja pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sudah memuaskan dengan katagori (A). Meskipun masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya.

Pencapaian Kinerja sasaran startegis pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebesar 100,11 persen dengan katagori BAIK (BERHASIL), hal ini merupakan hasil kerja keras dan wujud komitmen pimpinan serta jajaran Dinas Peternakan dalam meningkatkan kinerja yang tertuang dalam Strategi Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2023. Dalam rangka memberi kontribusi terhadap terwujudnya peningkatan PDRB Pertanian secara umum, maka OPD Dinas Peternakan Berkontribusi meningkatkan PDRB Sub Sektor Peternakan. Meningkatnya PDRB sub sektor peternakan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi ternak dengan indikator adalah meningkatnya produksi daging, telur dan susu.

Tabel 3.2
Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2023

NO	JENIS TERNAK	PRODUKSI (Ton)		PERTUMB. (%)
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	Daging	23.063	24.697	7,09
2	Telur	15.617	15.574	-0,28
3	Susu	12.865	12.976	0,86
TOTAL		51.545	53.247	3,30

Sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kambing, domba, ayam, itik, entok dan kelinci), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Ketersediaan Produksi daging merupakan ketersediaan dari produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, entok dan kelinci dalam bentuk meatyield. Pada tahun 2023, capaian produksi daging sebesar 24.697 ton atau meningkat 7,09 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 23.063. Bila dilihat sasaran indikator kinerja OPD Dinas Peternakan terhadap pertumbuhan produksi yang ditargetkan tahun 2023 adalah sebesar 3,29 persen, berdasarkan realisasi sebagai mana tabel 3.3 diatas dapat dicapai 3,30 persen atau terealisasi sebesar 100,3% . Untuk tingkat konsumsi daging tahun 2023 tingkat konsumsi daging masyarakat Kabupaten Jombang sebesar 17,56 kg/kapita/tahun atau naik sebesar 8,4 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 16,2 Kg/kapita/tahun. Ketersediaan Produksi telur tahun 2023 sebesar 15.574 ton atau mengalami penurunan sebesar 0,28 persen apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2022 yaitu sebesar 15.617 ton. Konsumsi telur selama tahun 2023 sebesar 11,22 kg/kapita/Tahun sedangkan tahun 2022 sebesar 11,12 kg/kapita/tahun atau meningkat sebesar 0,89 persen. Sasaran OPD Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang kedua yaitu sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan sebesar 80,14 dari target yang ditetapkan sebesar 80,20 dengan nilai capaian sebesar 99,93% belum mencapai target.



Tabel 3.3

Capaian Sasaran Program Dinas Peternakan Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terpenuhinya Penunjang Pemerintahan Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	100 %	100 %
2.	Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Pertumbuhan Populasi Ternak	5,60 %	8,9 %	158,9
3.	Terlaksananya ketersediaan prasarana yang memadai	Program Penyediaan dan Prasarana Pertanian	Prosentase ketersediaan prasarana peternakan yang memadai	10 %	10 %	100 %
4.	Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis	81 %	100%	123 %
			Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	87.5 %	88,98%	102 %
5.	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	80 %	100%	125 %

Analisis capaian indikator kinerja dari masing -masing Sasran Program adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Program 1

Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten

Capaian indikator Kinerja Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur merupakan perbandingan realisasi jumlah capaian kinerja seluruh PNS di Dinas Peternakan di bagai Jumlah Pegawai Dinas Peternakan Tahun 2023. Capaian indikator kinerja Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur sebesar 100%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2023 sebesar 100%, maka diperoleh capaian peningkatan Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja sebesar 100% dengan **kategori berhasil**.

b. Sasaran Program 2

Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak

Capaian indikator Prosentase pertumbuhan populasi ternak merupakan perbandingan realisasi populasi (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik dan Entok) terhadap target tahun 2023.

Capaian populasi ternak sebesar 8,9%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2023 sebesar 5,6% maka diperoleh capaian prosentase pertumbuhan populasi ternak sebesar 158,9% dengan kategori **sangat berhasil**.

Keberhasilan capaian kinerja prosentase pertumbuhan populasi ternak menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Dinas Peternakan sudah sesuai dengan sasaran. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, diantaranya Pengembangan ternak tahun 2023 terealisasi sebesar 5.263 ekor dari target sebesar 1.570 diperoleh capaian sebesar 335% dengan kategori **sangat berhasil**.

c. Sasaran Program 3

Terlaksananya Ketersediaan Prasarana yang memadai.

Transformasi menuju Peternakan Modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi. Dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi.

Capaian indikator Prosentase ketersediaan prasarana peternakan yang memadai sebesar 10%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2023 sebesar 10%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini sebesar 100% atau masuk dalam kategori **Berhasil**.



d. Sasaran Program 4

Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan

Indikator prosentase wilayah yang terkendali penyakit menular strategis merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit HLT, Brucellosis, SAL, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2023 sebesar 81% didapat dari 306 desa yang terkendali dibagi 248 terdampak dari 5 (lima) PHMS (HLT, Brucellosis, PMK, SAL serta LSD) dikalikan 100%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS. Kasus penyakit Avian Influenza (AI) pada unggas tahun 2023 tidak ada laporan (nihil) yang mana sejalan dengan kondisi di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kesadaran peternak unggas akan pentingnya vaksinasi dan biosekuriti. Vaksinasi teratur sesuai jadwal dan strategi biosekuriti yang ketat membawa dampak baik yaitu peningkatan kekebalan ternak dan menurunnya sirkulasi virus dilapangan. Helminthiasis (HLT) atau penyakit cacangan sejumlah pada tahun 2023 dilaporkan sejumlah 59 kasus. Jumlah tersebut hampir sama dibandingkandengan tahun 2022 yaitu 58 kasus. Peneguhan Diagnosa HLT didapat dari sejumlah sampel feses yang berasal dari ternak yang dicurigai menderita gejala cacangan secara klinis yang kemudian dikirimkan ke laboratorium kesehatan hewan (UPT Lab. Keswan Tuban Dinas Peternakan Provinsi). Dari hasil kasus positif HLT tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan



pengobatan cacing yang sesuai dengan memerhatikan kondisi ternak (terutama pada ternak yang bunting maka disarankan untuk ditunda sampai melahirkan).

Kejadian Penyakit Brucellosis (BR) pada tahun 2023 ditemukan sejumlah 93 kasus. Jumlah kasus tersebut menurun dibandingkan dengan kejadian pada tahun 2022 yaitu 166 kasus. Hasil penelusuran kasus brucella dilakukan melalui surveilans aktif yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dan Balai Besar Veteriner Wates. Karena kasus brucella lebih banyak yang tidak menunjukkan gejala klinis maka surveilans dilaksanakan secara acak terutama pada ternak yang terindikasi pernah bergejala keguguran. Pengujian brucella secara laboratorium dari sampel yang diuji melalui metode RBT, apabila menunjukkan hasil positif maka dilanjutkan dengan pengujian CFT. Hasil uji CFT ini yang menjadi acuan peneguhan diagnosa brucellosis. Sapi-sapi dengan hasil CFT positif maka disarankan untuk dilakukan pemotongan bersyarat, namun kondisi di lapangan susah untuk dilaksanakan karena secara klinis sapi tersebut tidak menunjukkan gejala sakit dan tidak adanya kompensasi/ganti rugi dari pemerintah menyebabkan peternak enggan melaksanakan. Solusi alternatif agak mengurangi penularan brucellosis yaitu dengan melakukan isolasi penderita brucellosis (sapi ditempatkan terpisah dari sapi yang lain) dan peningkatan sanitasi dan desinfeksi kandang serta melaksanakan program vaksinasi. Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan salah satu penyakit menular pada hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian ekonomi yang besar karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani. Upaya pengendalian dan penanggulangan serta respon cepat terhadap kasus PMK di Indonesia khususnya di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 memberikan hasil positif yang membanggakan. Hal ini didapatkan dari penurunan jumlah kasus PMK yang signifikan. Jika pada tahun 2022 jumlah kasus tercatat 7.877 ekor maka tahun



2023 menurun secara signifikan menjadi 476 kasus. Sejak bulan Juli 2023 sampai saat ini Kabupaten Jombang tercatat sudah nihil (zero case) PMK. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya vaksinasi PMK yang sangat masif dilakukan pada ternak rentan PMK (sapi, kerbau, kambing dan domba) sepanjang tahun 2023. Tercatat kinerja Vaksinasi PMK pada tahun 2023 di Kabupaten Jombang sejumlah 210.700 dosis yang terdiri dari vaksinasi ke-1, Vaksinasi ke-2 dan vaksinasi booster. Vaksinasi ternak secara teratur memiliki peranan penting dalam mengendalikan epidemi penyakit. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini sedang menjadi trend wabah penyakit ternak berkuku genap di wilayah Indonesia. Penularan PMK terhadap hewan ternak lainnya berlangsung sangat cepat. Sehingga langkah komprehensif perlu dilakukan selain vaksinasi. Salah satunya adalah peternak perlu diarahkan untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan rutin melakukan desinfeksi dan pentingnya tindakan karantina jika ada salah satu ternak yang mengalami ciri-ciri terserang PMK. Kasus Penyakit LSD (Penyakit Kulit Berbenjol) di Jombang pada tahun 2023 dilaporkan sejumlah 1.852 kasus dengan sebaran paling banyak di wilayah kecamatan utara Brantas (Plandaan, Kabuh, Ngusikan dan Kudu). Penyakit LSD merupakan penyakit hewan menular yang baru menjangkit di Jombang pada tahun 2023. Sejarah di Indonesia LSD pertama kali muncul pada di Riau Sumatera pada tgl 12 Januari 2022. Di Jawa Timur LSD ditemukan pertama kali pada tgl 2 Des 2022 di Kabupaten Blitar dan kemudian menyebar di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Jombang sejak 6 Februari 2023 ditemukan kasus dengan gejala mirip LSD di Kecamatan Plandaan dan Kabuh dan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratoris ke BBVet Wates dengan konfirmasi positif LSD. Kasus penyakit LSD dapat cepat menyebar dan biasanya dipicu oleh penularan melalui gigitan serangga. Beberapa Langkah/Upaya Pengendalian dan Penanggulangan LSD yang telah dilaksanakan yaitu Deteksi Dini, Penelusuran Kasus dan Pelaporan ke aplikasi ISIKHNAS, Penanganan dan pengobatan simptomatis pada ternak yang terdiagnosa LSD, Penyemprotan cairan desinfektan di pasar hewan, RPH dan kandang peternak, KIE terkait langka antisipatif LSD



dan upaya pengendalian vektor serangga kepada peternak dan stakeholder, Peningkatan pengawasan lalulintas ternak antar kabupaten/antar provinsi, Vaksinasi darurat LSD total 3.160 ekor pada sapi perah sejumlah 2.890 ekor dan sapi potong 270 ekor serta vaksinasi pada ternak terpilih sejumlah 3.000 dosis pada bulan Maret s/d Juni 2023. Sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini Kabupaten Jombang tercatat sudah nihil (zero case) LSD. Kasus Salmonellosis (SAL) pada tahun 2023 dilaporkan sejumlah 1 kasus sedangkan tahun 2022 dilaporkan 2 kasus. Kasus SAL tercatat dari hasil pengujian laboratorium terhadap 1 produk hewan (daging unggas) di RPH-U di Wilayah Kecamatan Mojowarno. Walaupun jumlah kasus SAL terbilang sangat kecil namun upaya-upaya seperti peningkatan hygiene sanitasi dan desinfeksi pada unit produksi (di peternakan, rumah pemotongan hewan dan di unit penjualan produk hewan) perlu dilaksanakan dengan baik.

Indikator Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang Beredar di Masyarakat.

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, maka pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan pangan berupa keamanan, mutu, dan gizi. Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan pangan segar asal hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah persentase pangan segar mulai dari unit produksi hingga peredaran yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan. Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal

hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (perishable food) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (hazardous food) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang Beredar di Masyarakat tahun 2023 sebesar 88,98%. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 256 sampel dibandingkan dengan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan secara keseluruhan sebanyak 324 sampel dikalikan 100%.

e. Sasaran Program 5

Terlaksananya peningkatan rekomendasi ijin usaha

Indikator Capaian Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha merupakan perbandingan realisasi rekomendasi izin usaha terhadap target tahun 2023.

Capaian Indikator prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha adalah sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80%, maka realisasi Indikator mencapai 125% atau masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.4.

Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2021- 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu	3,29	5,68	3,25	3,30



No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,20	76,91	80,13	80,14

Berdasarkan data diatas, Kinerja sasaran capaian Dinas Peternakan Tahun 2023 adalah Meningkatnya Produksi hasil Peternakan dengan indikator sasarannya yaitu Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu dengan capaian sebesar 100,3 persen .Untuk capaian kinerja kedua indikator sasaran sebagai mana tabel 3.3 Tahun 2023 ini dapat dicapai 99,93 persen atau kinerja BAIK.

Tabel 3.5
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2021 – 2023

NO	Sasaran Strategis>Nama Program>Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pertumbuhan populasi ternak	5,60%	5,60%	5,64%	8,94%
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Prasarana Peternakan yang Memadai	10%	0	50%	10%
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis	81%	0	80,00%	81%
		2. Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat	87,5%	87,5%	87,50%	88,98%
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha	80%	80%	61,54%	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur antara tahun 2022 dan tahun 2023 tetap tercapai 100% karena kegiatan bersifat rutin, untuk Prosentase pertumbuhan populasi

ternak tahun 2023 tercapai 160% meningkat dari tahun 2022 karena populasi untuk unggas terutama broiler yang terus meningkat. Prosentase ketersediaan prasarana peternakan yang memadai terealisasi 10% sedangkan tahun 2022 sebesar 50% karena jumlah sarana yang terehabilitasi semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2023 sebesar 81% meningkat 101,25% dari realisasi Tahun 2022 sebesar 80%. Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat tahun 2023 terealisasi sebesar 88,98%. sedangkan tahun 2022 sebesar 87,50 % hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan uji laboratorium yang dilakukan di Lab Tuban telah dilaksanakan sesuai jadwal dan banyak kasus kejadian penyakit maka sampel yang di uji lab melebihi target. Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha pada tahun 2023 terealisasi 100% meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 61,54%, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 banyak izin usaha yang harus diperbarui karena habis masa berlakunya.

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah

Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam periode Rencana Strategis 2018- 2023. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1. Presentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu	3,29%	3,30%	100,3%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,2	80,14	99,93%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan perbandingan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa presentase pertumbuhan, yaitu:

1. Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu.

Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu di Kabupaten Jombang tahun 2023 terealisasi sebesar 3,30% dengan tingkat capaian kemajuan sebesar 100,3% di Tahun ketiga perubahan renstra yang seharusnya sudah tercapai 100% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dinas peternakan untuk peningkatan produksi daging telur dan susu sudah memenuhi target dan berhasil mencapai target akhir RPJMD. Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa capaian indikator kinerja mengalami keberhasilan. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya Produksi Hasil Peternakan antara lain : 1) Pertumbuhan populasi ternak yang terus mengalami peningkatan seiring dengan penerapan berbagai program/kegiatan strategis dan tepat sasaran berbasis peternakan rakyat sehingga Produksi komoditas utama peternakan yakni daging, telur dan susu terus mengalami peningkatan, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. 2) Keberhasilan Program Penjaminan Kesehatan Hewan dalam menekan angka kejadian penyakit hewan strategis dan angka kematian ternak meskipun pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) namun upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan agar penyebaran PMK tidak meluas telah dilakukan secara maksimal dengan pengobatan pemberian vitamin dan vaksinasi pada ternak. 3) Pembinaan, fasilitasi dan sertifikasi unit usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan, baik pangan maupun non pangan. 4) Fasilitasi aksesibilitas permodalan dan asuransi ternak dan Pembinaan kelembagaan peternak 5) Pembinaan, fasilitasi pakan ternak dalam rangka mendorong peningkatan populasi dan produktivitas komoditas utama peternakan di Kabupaten jombang

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian diperlukan langkah – langkah strategis kedepan sebagai berikut :

1) Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak, 2) Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil 3) Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak. 4) Penjaminan produk asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal yang sesuai dengan standar Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Prosentase pertumbuhan Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan sebesar 80,14 dari target yang ditetapkan sebesar 80,2 dengan nilai capaian sebesar 99,93%. Dengan tingkat capaian sebesar 99,93% di tahun ketiga perubahan renstra yang seharusnya nilai evaluasi SAKIP sudah tercapai sebesar 80,2, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dinas peternakan untuk peningkatan nilai evaluasi SAKIP masih perlu ditingkatkan untuk bisa memenuhi target akhir RPJMD.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Program s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pertumbuhan populasi ternak	5,60%	8,94%	159,6%
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Prasarana Peternakan yang Memadai	10%	10%	100%
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis	81%	81%	100%



NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
		2 Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat	87,5%	88,98%	101,69%
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha	80%	100%	125%

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur tahun 2023 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% maka saat ini sudah mencapai 100% karena target tersebut mengacu pada Renstra Dinas Peternakan Tahun 2018-2023 Revisi ke II.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase pertumbuhan populasi ternak tahun 2023 sebesar 8,94% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 5,6% sudah mencapai 159,6% melebihi target Renstra.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase Ketersediaan Prasarana Peternakan yang Memadai tahun 2023 sebesar 10% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 10% sudah terealisasi 100% sesuai rencana.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis tahun 2023 sebesar 81% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 81% sudah terealisasi 100% sesuai rencana. Hal ini dapat tercapai karena adanya strategi pencegahan penularan zoonosis dilakukan melalui koordinasi instens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan zoonosis.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat tahun 2023 sebesar 81% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 81% sudah terealisasi 100% sesuai rencana. Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta pelaku usaha poduk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan

pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha tahun 2023 sebesar 80% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 100% sudah terealisasi 125% melebihi target.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas peternakan pada tahun 2023 untuk pencapaian indikator kinerja dari sasaran tersebut melalui Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sasaran program adalah terlaksananya peningkatan populasi ternak dengan indikator program yaitu prosentase pertumbuhan populasi ternak dengan target 5,6 % terealisasi 8,94%.

Program Penyediaan dan Pengembangan Pertanian terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kualitas pakan yang beredar masyarakat. Indikator kegiatan adalah prosentase pakan sesuai standart yang beredar di masyarakat teralisasi sesuai target sebesar 84%. Kegiatan ini memiliki kontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran berupa terjaminnya kualitas mutu pakan yang beredar di masyarakat melalui pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan mutu pakan yang beredar di masyarakat.

a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak.

Sasaran sub kegiatan berupa meningkatnya kualitas pakan yang beredar masyarakat dengan 1 indikator sub kegiatan yaitu jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar sebanyak 4 laporan terealisasi 100%.



2) Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil peternakan dengan indikator kegiatan yaitu jumlah populasi ternak dengan target 18.051.054 ekor terealisasi 18.827.162 ekor tercapai 104,30%.

a. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak.

Sasaran sub kegiatan berupa terlaksananya penjaminan peredaran benih/bibit ternak dengan indikator sub kegiatan yaitu, jumlah benih/bibit ternak yang beredar dengan target 1.570 ekor terealisasi sebesar 5.263 ekor hal ini dikarenakan ada bantuan ternak unggas dengan jumlah yang besar.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sasaran Program adalah tersedianya prasarana peternakan yang memadai dengan indikator prosentase ketersediaan prasarana peternakan yang memadai sebesar 10%.

1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Sasaran kegiatan adalah pemenuhan prasarana yang terehabilitasi dan terbangun dengan indikator prosentase prasarana yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara 100% melalui sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.

Sasaran Sub Kegiatan berupa terlaksananya pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan sejumlah 1 unit terealisasi 1 unit

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sasaran Program adalah terlaksananya peningkatan status kesehatan ternak dan produk hewan dengan 2 Indikator Program yaitu prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis dengan target 81% terealisasi 81% dan indikator Prosentase produk hewan yang ASUH

(Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat sebesar 87,5% terealisasi 88,98%. Kontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran berupa meningkatkan kualitas produk peternakan melalui peningkatan kualitas kesehatan hewan yang tampak dari menurunnya angka kejadian penyakit ternak dan angka kematian ternak.

1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil peternakan dengan indikator kegiatan yaitu prosentase ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan sebesar 3,5% terealisasi 5,28%.

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Sasaran sub kegiatan meningkatnya produksi hasil peternakan dengan Indikator sub kegiatan yaitu indikator Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Zoonosis sebanyak 12 laporan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan pelayanan pengujian laboratorium dan medik veteriner dengan target indikator 100% tercapai 195,98% karena jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan melebihi target yang ditentukan. Dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner

Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner di arahkan untuk pemenuhan pengujian yang dilaksanakan dan layanan pencegahan dan penanganan penyakit dengan indikator sebesar 12 laporan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Hewan

dengan target 11.660 ekor terealisasi sebesar 10.340 ekor dengan capaian sebesar 88,68%

b. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Sasaran sub kegiatan meningkatnya produksi hasil peternakan dengan Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dengan target sebesar 12 laporan terealisasi 100%. Sub Kegiatan ini memiliki kontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran berupa meningkatkan kualitas produk peternakan melalui peningkatan pembinaan terhadap kelompok dan peningkatan pengetahuan tentang pasca panen hasil peternakan.

c. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Sasaran sub kegiatan meningkatnya produksi hasil peternakan dengan Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dengan target 12 laporan terealisasi 100%. Sub kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia bahan pangan asal hewan dan melakukan pengujian sampel bahan asal hewan yang diuji sebanyak 210 sampel dan hasil pendataan informasi harga pasar selama 264 hari.

4) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil peternakan dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sebanyak 3 produk terealisasi 100% dan indikator Jumlah pembinaan terhadap peserta pelatihan pengolahan hasil ternak sebesar 100%. Kegiatan ini memiliki kontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran berupa meningkatkan kualitas produk peternakan melalui uji laboratorium terhadap sampel produk hasil peternakan.

d. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Sasaran sub kegiatan meningkatnya produksi hasil peternakan dengan Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah pendampingan Unit

4. Program Program Perizinan Usaha Pertanian

Sasaran Program adalah terlaksananya peningkatan rekomendasi ijin usaha dengan Indikator Program Prosentase peningkatan rekomendasi ijin usaha sebesar 80% tercapai 125%.

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, RPH.

Sasaran kegiatan meningkatnya produksi hasil peternakan dengan Indikator kegiatan Jumlah rekomendasi izin usaha peternakan yang memenuhi syarat sejumlah 9 rekomendasi teralisasi sejumlah 10 rekomendasi. Kegiatan ini memiliki kontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran berupa meningkatkan kualitas produk peternakan melalui terciptanya usaha peternakan yang terekomendasi.

a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, RPH.

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi rekomendasi ijin usaha peternakan dengan Indikator sub kegiatan yaitu indikator Jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, RPH sejumlah 9 dokumen terealisasi sejumlah 10 dokumen.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menetapkan Indikator Sasaran yaitu Meningkatnya populasi dan produksi sub sektor peternakan dengan indikator sasaran adalah persentase pertumbuhan populasi dan produksi sub sektor peternakan. Capaian kinerja sasaran diukur

dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian tahun n	Capaian Nasional
Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu	100,3%	320%

Capaian kinerja indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tahun 2023 sebesar 101% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional dengan capaian kinerja sebesar 320%.

Tabel :3.9
Capaian Kinerja Pertumbuhan Produksi Daging
Dirjen PKH Tahun 2022 – 2023

No.	Jenis Daging	2022			2023*)			% pertumbuhan realisasi 2022-2023
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	
1	Sapi	373.771	374.431	100,18	382.218	377.278	98,71	0,76
2	Kerbau	14.322	16.542	115,50	14.453	16.568	114,63	0,16
3	Kambing	41.568	41.219	99,16	42.649	41.590	97,52	0,90
4	Domba	34.719	35.669	102,74	34.767	36.241	104,24	1,60
5	Babi	177.141	102.477	57,85	178.292	104.141	58,41	1,62
6	Ayam Buras	273.118	276.729	101,32	276.477	280.726	101,54	1,44
7	Ayam Ras Pedaging	3.497.897	3.668.879	104,89	3.608.430	3.997.653	110,79	8,96
8	Itik	41.792	44.648	106,83	42.578	44.646	104,86	0,00
Total		4.454.328	4.560.594	102,39	4.579.865	4.898.841	106,96	7,42

Sumber: Buku Statistik PKH, Ditjen PKH, 2023



Tabel :3.10

Capaian Kinerja Pertumbuhan Produksi Telur
Dirjen PKH Tahun 2022 – 2023

No.	Jenis Komoditas	2022			2023*)			% Pertumbuhan Realisasi 2022-2023
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	
1	Ayam Buras	374.227	389.272	104,02	379.840	388.462	102,27	-0,21
2	Ayam Ras Petelur	5.523.454	5.579.246	101,01	5.605.201	6.117.905	109,15	9,65
3	Itik	320.875	316.175	98,54	328.062	324.691	98,97	2,69
4	Puyuh	24.446	22.015	90,06	24.625	22.399	90,96	1,74
5	Itik Manila	30.855	33.181	107,54	31.086	33.529	107,86	1,05
Total		6.275.879	6.339.889	101,02	6.368.815	6.886.987	108,14	8,63

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Capaian Produksi Susu tahun 2023 sebesar 837.223 ton (angka sementara) atau mencapai 100,33% dari target sebesar 834.492 ton. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu pada tahun 2023 mencapai 1,57% dari target 1,25%, artinya capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu sebesar 125,60%. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2023 sebesar 1,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 2,39%, maka diperoleh capaian sebesar 65,69%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,66%, maka diperoleh capaian sebesar 94,58%.

Tabel :3.11

Capaian Kinerja Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu
Dirjen PKH 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%	KEBERHASILAN
SP1 Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak	1 Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	2,82	7,42	263,12	Sangat Berhasil
	2 Peningkatan Produksi Susu	%	1,25	1,57	125,60	Sangat Berhasil
	3 Peningkatan Produksi Telur	%	1,51	8,63	571,52	Sangat Berhasil

Dari prosentase capaian indikator produksi daging, telur dan susu di peroleh rata-rata capaian kinerja sebesar 320% dengan kategori sangat berhasil. Sementara itu untuk capaian kinerja sasaran indikator Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu Dinas Peternakan sebesar 100,3 % jauh dibawah capaian dirjen PKH.



3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan produksi daging, telur dan susu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, diantaranya:

- Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) 2023 pada tahun 2023 mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 23.000 ekor atau mencapai 100% dari target 23.000 ekor.
- Pengembangan ternak ruminansia tahun 2023, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 236 ekor, kambing/domba sebanyak 843 ekor.
- Pengembangan unggas lokal tahun 2023 sebanyak 5.006 ekor.
- Penandaan dan Pendataan Ternak sebanyak 32.501 ekor dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi dan penanggulangan wabah PMK sebanyak 210.700 dosis.
- Peningkatan kapasitas petugas dan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan pelaksanaan refresher IB sapi/kerbau sebanyak 49 orang petugas IB.
- Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
- Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi Good Breeding Practices (GBP) dan Good Farming Practices (GFP) dan mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan
- Penguatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan memfasilitasi ketersediaan obat-obatan dan sarana lainnya di lokasi kegiatan prioritas.

- Penempatan Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk membantu dinas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit.
- Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan agar penyediaan daging bagi masyarakat memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan.
- Peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet di UPT Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan.
- Pemeriksaan kesehatan hewan (ante-mortem/AM) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (post-mortem/PM). Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan zoonosis dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak dipotong di RPH. Pemeriksaan AMPM merupakan elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, sehingga data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini hazard (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.

3.2. Ralisasi Anggaran

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 10.491.720.224,- dari Anggaran murni sebesar Rp. 8.755.383.024.- Realisasi Penyerapan anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.642.500.729,- (91,91 Persen) dan realisasi fisik kegiatan sebesar (100,11 Persen). Untuk rincian belanja per program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Rincian belanja per program Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis/Nama Program/Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatkan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	7.054.366.282	6.284.870.353	89,09
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pertumbuhan populasi ternak	5,6%	8,94%	100	1.840.208.776	1.810.969.500	98,41
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase ketersediaan Prasarana peternakan yang memadai	10%	10%	100	90.221.217	89.863.800	99,60
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase angka kejadian penyakit ternak ruminansia	81%	81%	100	1.465.750.499	1.418.219.895	96,76
		2. Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat	87,5%	88,98%	102			
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha	80%	100%	125	41.173.450	38.577.131	93,69

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara umum terjadi efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja pada tahun 2023. Sisa anggaran sebesar Rp. 849.219.495,00 merupakan efisiensi anggaran dari gaji dan tunjangan serta pengadaan barang.

Realisasi sebesar Rp. 9.642.500.729,00 dipergunakan untuk :

1. Bantuan ternak 5.263 ekor.
2. Pelayanan Keswan Terpadu 3.696 ekor dan RPH 10.340 ekor.
3. Pengujian sampel penyakit 37.726 kali
4. Pengawasan produk asal hewan yang ASUH 88,98%.
5. Rehabilitasi dan sarana prasarana RPH 1 unit

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu.	3,29%	3,30 %	100,3	10.491.720.224	9.642.500.729	91,91 %
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (80,20)	A (80,14)	99,93			

Secara umum, Penyerapan Anggaran untuk program dan kegiatan di Dinas Peternakan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 91,91% yakni sebesar Rp. 9.642.500.729 dari alokasi Rp. 10.491.720.224. Hal tersebut dapat dikategorikan berhasil dengan baik karena adanya efisiensi anggaran.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi capaian kinerja per sasaran dilihat dari tabel berikut :

Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Anggaran

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	100,3	97,10	3,2
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	99,93	85,53	14,4

Dari tabel di atas didapati bahwa realisasi kegiatan pendukung sasaran terdapat efisiensi sebesar 3,2 % untuk indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu sedangkan untuk indikator sasaran kedua tidak dapat dihitung efisiensinya karena tidak terealisasi 100% dalam mencapai target kinerja. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011.

Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan bidang Peternakan maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan ini maka kualitas sumberdaya yang profesional dan memiliki integritas, keahlian teknis menjadi prasyarat mutlak di Dinas Peternakan sehingga dapat mendukung optimalnya operasionalisasi teknis fungsional, misalnya dalam hal penyuluhan, ketersediaan sumberdaya aparatur bidang peternakan maupun medis kesehatan hewan (dokter hewan).

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memiliki 113 (seratus tujuh belas) Sumber Daya Manusia, meliputi 33 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 (tujuh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 73 (tujuh puluh enam) orang

tenaga kontrak (Non PNS). Susunan pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 3.15
Gambaran Umum Pegawai
di Lingkup Dinas Peternakan Kab. Jombang Tahun 2023

Pegawai	Target	Ralisasi	Capaian (%)
PNS			
ESELON II	1 orang	1 orang	
ESELON III	4 orang	4 orang	
ESELON IV	2 orang	2 orang	
Fungsional Khusus	83 orang	9 orang	
Fungsional Umum	72 orang	17 orang	
P3K			
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	10 orang	7 orang	
NON PNS			
Tenaga Honorer Dinas	26 orang	26 orang	
Petugas IB Swadaya	38 orang	34 orang	
Tenaga Kontrak RPH	12 orang	13 orang	
TOTAL	248 orang	113 orang	45,56

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Sumberdaya Manusia	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	100,3	45,56	54,74%
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	99,93	45,56	54,37%

Dari tabel di atas didapati bahwa capaian realisasi sasaran terhadap ketersediaan sumberdaya manusia terdapat efisiensi sebesar 54,74% untuk indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu sedangkan untuk indikator sasaran kedua meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebesar 54,37%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011.

Efisiensi Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Peternakan yang dapat difungsikan sebagai unit pelayanan berupa gedung perkantoran dan gedung penunjang teknis yang ada di Dinas Peternakan :

1. Rumah Potong Hewan ada 4 (Jombang, Ploso, Mojoagung dan Ngoro)
2. Puskesmas ada 3 (Puskesmas Jombang, Ploso ,Ngoro, Diwek dan Mojoagung)
3. Klinik Hewan type C
4. Pusat Perbibitan Ayam Lokal (Chicken Development Centre)

Tabel 3.17
Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Tahun 2023

Pegawai	Target	Ralisasi	Capaian (%)
Sarana Penunjang (Gedung)	10 unit	10 unit	
Prasarana (laptop/Komputer, printer)	121 unit	50 unit	
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	5 unit	4 unit	
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	39 unit	30 unit	
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	5 unit	1 unit	
Meja dan Kursi Kerja	108 unit	95 unit	
TOTAL	293 unit	190 unit	64,85

Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal tersebut. Karena itu Rumah Potong Hewan juga harus memenuhi standarisasi Nomor Kontrol

Veteriner (NKV). Sedangkan permasalahan saat ini masih banyak pemotongan ilegal di luar RPH serta masih sedikit RPH yang ber-NKV.

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	100,3	64,85	35,45
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	99,93	64,85	35,08

Dari tabel di atas didapati bahwa capaian realisasi sasaran terhadap ketersediaan sarana dan Prasarana terdapat efisiensi sebesar 35,45% untuk indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu sedangkan untuk indikator sasaran kedua meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 35,08%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011.

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

- Dinas Peternakan menerapkan dan terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tergambar dari perolehan Nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 80,14 dengan kategori A atau Memuaskan.
- Penerapan Good Breeding Practices (GBP) dan Good Farming Practices (GFP) pada peternak/ kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
- Peningkatan kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (bebas, sporadik, endemik, dan wabah) seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis, dan pengawasan obat hewan .
- Memprioritaskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan.
- Mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan



kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV dan registrasi produk hewan.

- Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar serta pelayanan informasi pasar.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Peternakan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKJIP Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Peternakan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam mendukung pembangunan sub sektor peternakan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator berupa :

- 1) Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tercapai 3,3% dari target sebesar 3,29%
- 2) Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 80,14 dari target 80,2.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran kinerja, prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tercapai 100,3% sedangkan prosentase nilai evaluasi SAKIP tercapai 99,93%. Sasaran meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dengan indikator Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu telah memenuhi target pada tahun 2023 dikarenakan meningkatnya populasi yang berbanding lurus dengan produksi terutama untuk ternak unggas dan mulai meningkatnya kembali daya beli masyarakat di masa pandemi covid 19 yang berpengaruh terhadap pertumbuhan produksi peternakan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang DPA Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.491.720.224, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.642.500.729, atau dengan serapan



dana APBD mencapai 91,91%. Dengan demikian dapat dikatakan pada Tahun 2023 Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 849.219.495,00 atau 8,09%. Sisa anggaran ini karena efisiensi anggaran dari gaji dan tunjangan serta pengadaan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang belum optimal karena tidak memperhitungkan ketersediaan anggaran dan jumlah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Peternakan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2023 di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja pelaksana diantaranya:

- a. Pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat dilaksanakan diakhir tahun, sehingga bantuan kepada masyarakat belum bisa di ukur dampak keberhasilan pada tahun 2022.
- b. Masih tingginya kejadian penyakit gangguan reproduksi pada ternak ruminasia (Sapi dan Kerbau) yang tidak tertangani, karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.
- c. Ketersediaan sumberdaya yang memiliki kompetensi teknis dan administrasi sangat terbatas.
- d. Masih tingginya harga pakan ternak unggas dan masih rendahnya kemampuan pengolahan dan penyediaan pakan ternak unggas secara mandiri oleh peternak
- e. Kelompok tani ternak belum berfungsi optimal, masih bersifat formalitas (membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah
- f. Masih terjadi pemotongan ternak betina produktif akibat fungsi pengendalian belum berjalan optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ternak betina produktif dalam menjaga populasi.
- g. Belum optimalnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan.



- b. Belum terintegrasi kegiatan dari hulu sampai hilir untuk produk peternakan yg dihasilkan yg menyebabkan nilai tambah belum optimal.

Saran Dan Tindak Lanjut

- a. Pelaksanaan penganggaran program/kegiatan yang ditentukan kepada masyarakat hendaknya dianggarkan pada awal tahun bukan PAPBD sehingga realisasi kegiatan tidak merumpuk diakhir tahun. Upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan lebih awal proses administrasi dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa supaya kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
- b. Diperlukan tambahan tenaga sesuai tingkat kepegawaian sehingga semua tugas bisa dilaksanakan sesuai harapan. Untuk meningkatkan SDM petugas yang ada upaya dapat maksimal diperlukan pelatihan/ bimbingan teknis.
- c. Melakukan fasilitasi kepada kelompok/pelembu usaha untuk melakukan uji laboratorium pakan ternak, untuk memenuhi kebutuhan peternak, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.
- d. Memperkuat kelembagaan kelompok dengan melakukan pendampingan, bina dan kelompok diharapkan berkembang menjadi kelompok yang ber korporasi.
- e. Melakukan Revitalisasi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan.
- f. Memberikan berbagai macam pelatihan/pengolahan produk hasil peternakan bagi kelompok ternak untuk meningkatkan penghasilan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang tahun 2023, semoga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang

Jombang, Februari 2024
SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN JOMBANG


AGUS KUSLO SUGIANTO
Pemuda Muda Muda
NIP. 46402211990031004



Lampiran 1: Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/745/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO**
Jabatan : **Kepala Dinas Peternakan**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 12 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA Kepala
Dinas Peternakan

Ditandatangani secara elektronik



Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP. 196412251990031004

PIHAK KEDUA Pj.
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

KODE UNIT : 415.01



Dokumen ini telah dipandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) 852N



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	3,29
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,20

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terperolehnya Perwujudan Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perwujudan Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	7.054.566.282
2.	Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak	5,8 %	1.840.208.776
3.	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	Pengendalian	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	81 %	1.465.750.409
				87,3 %	
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana peternakan yang memadai	10 %	90.221.217
4.	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	Program Peningkatan Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	80 %	41.173.450
					10.491.730.224

Jombang, 12 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA Kepala
Dinas Peternakan

Ditandatangani secara elektronik



Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP. 196412251990031004

PIHAK KEDUA Pj.
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

KODE UNIT : 415.01



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang disertai dengan Sertifikat Elektronik (SSE), 2023



Lampiran 2 : Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG		PERIODE PENILAIAN:		1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023	
NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO	1	NAMA	Hj. MUNDJIDAH WAHAB	
2	NIP 196412251990031004	2	NIP (*opsional)	-	
3	PANGKAT/GOL. RUANG Pembina Utama Muda / IV c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	-	
4	JABATAN KEPALA DINAS PETERNAKAN	4	JABATAN	BUPATI JOMBANG	
5	UNIT KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG	5	INSTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG	
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	IKU.1 Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	3,29%	Penguatan Internal	
2	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	IKU.2 Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	80,20	Proses Bisnis	
3	Terperuhnya Pemungutan Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten	IKI.1 Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Anggaran	
4	Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak	IKI.2.1 Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak	5,6%	Anggaran	
5	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	IKI.2.2.1 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	81%	Anggaran	
		IKI.2.2.2 Persentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Borebar di Masyarakat	87,5%	Anggaran	
6	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	IKI.2.3 Persentase Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	80%	Anggaran	
B. TAMBAHAN					
1	-	-	-	-	

PERILAKU KERJA*	
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti <p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan <p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik <p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif <p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara <p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif <p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melaksanakan tugas dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Dapat Mengkondisikan suasana kerja yang kondusif melalui peningkatan hubungan antar staf</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Dapat sesuai Peraturan dan Undang-undang yang berlaku</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Dapat menggerakkan seluruh Sumber Daya untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Mampu mewujudkan kerjasama antar staf dan stakeholders yang lebih baik</p>

Pegawai Yang Dinilai

(Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO)
(196412251990031004)

(Jombang, 02 Januari 2023)
Pejabat Penilai Kinerja

(Hj. MUNDJIDAH WAHAB)
(1)



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG		PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023
DUKUNGAN SUMBER DAYA		
1	Dibutuhkan Perumusan Kebijakan, Laporan Program Kegiatan, Capaian Kinerja, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi untuk menjadi pedoman dan dapat meningkatkan Kualitas Dinas Peternakan dengan Lebih Baik	
2	Dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidangnya	
3	Dibutuhkan koordinasi Antar Pimpinan OPD dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian	
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN		
1	Laporan Capaian Realisasi Anggaran tribulanan dan Tahunan	
2	Laporan dari masing-masing bidang terkait dengan hasil pelaksanaan tugas	
KONSEKUENSI		
1	Apabila memenuhi ekspektasi Pimpinan maka akan diberikan Reward	
2	Apabila tidak memenuhi ekspektasi Pimpinan maka akan diberikan teguran dan pembinaan	

Pegawai yang Dinilai

(Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO)
(196412251990031004)

(Jombang, 02 Januari 2023)
Pejabat Penilai Kinerja

(Hj. MUNDJIDAH WAHAB)
(-)



Lampiran 3 : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

- 1. INDA : Eva AGUS SUNLOLOHITO
- 2. KEP : 184-223180-2024004
- 3. PANGKAL: 021. RWARGO : Pevonia Utami Mula, ST / II
- 4. JEMKASIT : Desa Dasa Perumahan
- 5. UNIT KERJA : Desa Perumahan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET						
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Stabilitas Perangkat Daerah	IKU 1 : Rata-rata Evaluasi ASUP Perangkat Daerah	1. Mengkoordinasikan dan supervisi ASUP Perangkat Daerah	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi ASUP Perangkat Daerah	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi ASUP Perangkat Daerah	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi ASUP Perangkat Daerah	25%
2	Terwujudnya Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kerja-kegiatan Operasional Aparatur Sipil Negara	IKU 1.1 : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur sipil negara	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana-kegiatan Kerja-kegiatan Aparatur Sipil Negara	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana-kegiatan Kerja-kegiatan Aparatur Sipil Negara	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana-kegiatan Kerja-kegiatan Aparatur Sipil Negara	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana-kegiatan Kerja-kegiatan Aparatur Sipil Negara	25%
3	Meningkatnya Produktivitas dan Penerimaan Masyarakat	IKU 2 : Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	1. Mengkoordinasikan dan supervisi pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%
4	Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak	IKU 2.1 : Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Populasi Ternak	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Populasi Ternak	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Populasi Ternak	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Populasi Ternak	25%
5	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produktivitas Ternak	IKU 2.2 : Persentase Wilayah yang Terkendali dan Peningkatan Herdmanajemen Strategis	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Wilayah yang Terkendali dan Peningkatan Herdmanajemen Strategis	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Wilayah yang Terkendali dan Peningkatan Herdmanajemen Strategis	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Wilayah yang Terkendali dan Peningkatan Herdmanajemen Strategis	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Wilayah yang Terkendali dan Peningkatan Herdmanajemen Strategis	25%
6	Terlaksananya Peningkatan Penerimaan dan Stabilitas Harga Usaha	IKU 2.3 : Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Usaha	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Produk Ternak yang ASUP (Amor, Sehat, Utuh, dan Sehat) yang Beredar di Masyarakat	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Produk Ternak yang ASUP (Amor, Sehat, Utuh, dan Sehat) yang Beredar di Masyarakat	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Produk Ternak yang ASUP (Amor, Sehat, Utuh, dan Sehat) yang Beredar di Masyarakat	25%	1. Mengkoordinasikan dan supervisi Produk Ternak yang ASUP (Amor, Sehat, Utuh, dan Sehat) yang Beredar di Masyarakat	25%

Jember, 01 Januari 2023
 Kepala Dinas, Pevonia Utami Mula
 Drs. Eva AGUS SUNLOLOHITO
 NIP. 196112251990031004

Anas Lemping

 BAKOSURABAYA WABRI



Lampiran 4 : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERCAPAIAN KINERJA
TRIBULAN 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
 2 NIP : 196412251990031004
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)
 4 JABATAN : Kepala Dinas Peternakan
 5 UNIT KERJA : Dinas Peternakan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	IKI.1 Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Mengkoordinasikan dan supervisi SAKIP Perangkat Daerah	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
2	Terperuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	IKI.1.1 Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Bata-rata capaian Kinerja Aparatur	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
3	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	IKI.2 Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
4	Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak	IKI.2.1 Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan: Pertumbuhan Populasi Ternak	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
5	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	IKI.2.2.1 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan: Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
		IKI.2.2.2 Persentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan: Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
		IKI.2.2.3 Persentase ketersediaan Prasarana Peternakan yang	3 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan: ketersediaan Prasarana Peternakan yang memadai	100 %	100 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
6	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	IKI.2.3 Persentase Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan: Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	25 %	25 %	100%	Pelaksanaan Program sudah diselesaikan sesuai target	Untuk dipertahankan	Foto Dokumen
RATA-RATA CAPAIAN							100%		

Atasan Langsung
Pj. Bupati Jombang

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.
NIP. -

Jombang, 30 Desember 2023

Kepala Dinas Peternakan
Kabupaten Jombang

Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP.196412251990031004

